

WOMAN EXISTENCE IN LOCAL LEGISLATURE AT YOGYAKARTA
SPECIAL REGION 1956-1982

By Nur Janti

Jantinur.nj@gmail.com

Abstract

This research is about woman history in Yogyakarta. The time span from 1956-1982 was selected to compare woman condition in different era, which is Constitutional Democracy to Sukarno's Era that Guided Democracy happened, transition era from Sukarno to Suharto, and Suharto's Era. This research is trying to explain about the progress and development of political and women condition from 1956 to 1982.

The historical method used in this research consist heuristic, verification, interpretation, and historiography. Heuristic is collecting source and data related to the theme. Verification is checking fact and validity of the data and source. Interpretation is done to view the historical fact so it could be write analytically and logically. Historiography is writing the historical story that had been verified and valid.

The result of this research found that women condition in Sukarno's Era is militant. Sukarno in every occasion invite and ask women to be understand about politics. A lot of parties in this era had woman organization, like Aisyiyah, Wanita NU, Wanita Katolik, and Wanita Marhaenis. This organization is one of a lot of way for women to being part of local legislature. In Suharto's Era, women movement is controlled by government using institution that made by them. Suharto tried to implement state ibuisim to domesticating women activity. Although there is women legislators but it change from militant to passive-participatory. In Sukarno's Era the legislators is chosen, not being elect. Sukarno just 3 times held the election. One in 1955 is national election, 1951 and 1957 is local election to choose Yogyakarta's legislators. Meanwhile, women legislators in Suharto's Era came from wife organization such as PIA Ardhya Garini the air force's wife organization, Persit Kartika Chandra Kirana the army's wife organization, and Dharma Wanita the organization for government employee's wife. The women being local congresswoman came from Golongan Karya, new parties that found by army and government. They were being legislators by order from the military leader. The number of women in Sukarno's Era was 7 person, they were in duty for some period. It is different from Suharto's Era, there was 9 woman in legislative. They were in duty just for one period. The participation of women in both era is not significant, but still active. In Sukarno's Era, Thr. Sumarto is the most active woman in legislative. She was the member of Panitia Otonomi. Meanwhile in Suharto's Era Kantini Widodo and Tisniarti was being the leader of commission E and D in local legislators in Yogyakarta special region.

Keyword: Existence, woman, local house representatives, Yogyakarta

Abstrak

Eksistensi Perempuan di DPRD DIY 1956-1982

Oleh: Nur Janti

11407144010

Skripsi berjudul *Eksistensi Perempuan di DPRD DIY 1956-1982* ini mengambil tema sejarah perempuan. Pemilihan rentang waktu penelitian bertujuan untuk membandingkan kondisi perempuan ketika model pemerintahan masih Demokrasi Konstitusional, kemudian masuk ke Era Sukarno dengan Demokrasi Terpimpin, era transisi dari Sukarno ke Suharto, lalu yang terakhir adalah era Suharto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan perkembangan kondisi politik juga perempuan sepanjang tahun 1956-1982.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis yang terdiri atas heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah. Heuristik merupakan pengumpulan sumber dan data terkait tema yang diangkat. Kritik sumber merupakan upaya untuk memilah dan menguji validitas data yang sudah didapat baik dari fisik maupun isi data tersebut. Interpretasi dilakukan untuk menafsirkan fakta sejarah agar fakta sejarah dapat dirangkai secara logis dan analitis. Terakhir adalah penulisan sejarah, yakni proses penulisan yang di dalamnya berisi hasil dari interpretasi serta mencantumkan cerita sejarah yang sebelumnya telah diuji.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pada era Sukarno ruang gerak perempuan untuk terjun ke politik sangat terbuka. Sukarno dalam berbagai kesempatan selalu mengajak perempuan untuk berpolitik. Organisasi perempuan sayap partai, seperti Aisyiyah, Wanita NU, Wanita Katolik, dan Wanita Marhaenis, adalah salah satu jalan para perempuan untuk menjadi anggota DPRD DIY. Di era Suharto ruang gerak perempuan dipersempit dengan organisasi bentukan pemerintah. Suharto berusaha menerapkan ibuisme negara untuk meredam aktivitas politik perempuan. Meskipun keterwakilan perempuan di DPRD masih ada tapi beralih dari semula militan menjadi partisipatoris-pasif. Pengangkatan anggota DPRD DIY di era Sukarno dilakukan melalui penunjukan, bukan melalui pemilihan. Pemerintah Sukarno hanya sekali melaksanakan pemilu nasional pada 1955, sedangkan pilkada DIY diselenggarakan dua kali, yakni 1951 dan 1957. Perempuan anggota DPRD DIY di era Suharto datang dari organisasi istri baik militer, seperti PIA Ardhya Garini, Persit Kartika Chandra Kirana, maupun Dharma Wanita. Mereka masuk ke DPRD DIY melalui Golongan Karya dengan penugasan. Jumlah perempuan anggota DPRD DIY di era Sukarno sebanyak 7 orang dan cenderung menjabat lebih dari satu periode. Berbeda halnya di era Suharto, yakni 9 orang dengan pergantian person di tiap periode. Peran perempuan di kedua zaman tidak memiliki pengaruh yang besar namun tetap aktif. Sebagai contoh Thr. Sumarto, anggota DPRD DIY era Sukarno terpilih menjadi Panitia Otonomi sedangkan di era Suharto Kantini Widodo dan Tisniarti menjadi ketua dan wakil ketua komisi.

Kata Kunci: Eksistensi, Perempuan, DPRD, Yogyakarta

A. Pendahuluan

Di Era Sukarno, ada banyak perempuan yang terjun ke bidang politik. Sebagai contoh Surastris Karma Trimurti yang menjadi Menteri Tenaga Kerja 1947-1948 serta Maria Ulfah yang menjabat Menteri Sosial tahun 1946-1947 dan menjadi Sekretaris Perdana Menteri dari 1947-1962 di bawah Perdana Menteri Amir Sjarifuddin. Tidak hanya Maria Ulfah dan SK Trimurti, ada banyak perempuan yang terjun ke bidang politik dan gerakan perempuan melalui organisasi-organisasi perempuan. Hal tersebut dikarenakan situasi politik dan budaya pada masa pemerintahan Presiden Sukarno mendukung perempuan untuk terjun dalam organisasi maupun dalam ranah politik. Presiden Sukarno sendiri sering kali menyerukan kepada para perempuan untuk paham politik dan turut-serta dalam gerakan revolusioner.¹

Pembentukan sayap perempuan dalam beberapa golongan dan partai

juga banyak dilakukan. Contohnya Aisyiyah sebagai sayap perempuan untuk Muhammadiyah dan Wanita Taman Siswa sebagai sayap perempuan untuk Taman Siswa. Organisasi perempuan jenis ini merupakan bagian dari sayap organisasi yang dikuasai oleh laki-laki, oleh karena itu sering kali gerakan ini lebih fokus pada masalah sosial dan kurang bebas dalam menentukan sikap terutama saat membahas mengenai Undang-undang Perkawinan pada dekade 1950-an. Tindakan partai-partai yang mendirikan organisasi sayap perempuan ini bisa dikatakan pula sebagai upaya untuk memobilisasi gerakan perempuan tanpa turut-serta dalam perjuangan hak-hak perempuan karena terdapat pembagian urusan dalam organisasi laki-laki yang memiliki sayap perempuan.² Bila organisasi laki-laki mengurus politik dan masalah-masalah utama, organisasi sayap perempuan akan

¹ Sukarno, *Wanita Indonesia Selalu Ikut Bergerak Dalam Barisan Revolusioner*, Pidato, (Jakarta: 24 Juli 1964), hlm. 9-11.

² Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Jakarta: Gerba Budaya, 1999), hlm. 223.

mengurusi masalah sosial, moral, dan kesejahteraan.

Di era Suharto, pemerintah tidak ingin organisasi perempuan, khususnya non-parlemen, aktif dan menyuarakan isu-isu perempuan. Ruang gerak perempuan untuk terjun ke ranah publik ditekan secara diam-diam melalui lembaga bentukan pemerintah, yakni Kowani, Dharma Wanita, dan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK)³. Melalui lembaga inilah, Suharto menanamkan serta menekankan kembali peran perempuan sebagai ibu dan istri yang seharusnya patuh sebagai upaya penjinakan perempuan dengan ibuisme negara.

Ibuisme negara yang akan dijadikan teori dalam tugas akhir ini mencirikan bahwa pemerintah atau sebuah organisasi memiliki upaya untuk mempersempit ruang gerak perempuan di ranah publik dengan menekankan kembali peranan

tradisional perempuan sebagai istri dan ibu.⁴

Perbedaan kondisi sosial di kedua rezim tersebut akan menjadi konteks penelitian tentang eksistensi perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY). Mengingat fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif, keikutsertaan perempuan dalam politik parlemen, khususnya di kursi DPRD, sangat penting sebagai perwakilan dari suara perempuan. Hadirnya perempuan sebagai anggota DPRD juga berguna untuk mengawal kebijakan dan mengusulkan hak-hak perempuan. Hal ini bukan berarti bahwa laki-laki tidak bisa atau tidak mungkin menyuarakan hak perempuan. Laki-laki yang memiliki perspektif adil gender bisa saja turut menyuarakan hak-hak perempuan, hanya saja hal tersebut tentu akan berbeda bila perempuan sendiri yang menyuarakan haknya.

³ Mulanya kepanjangan PKK adalah “Program Kesejahteraan Keluarga” namun pada 1982 diubah menjadi “Pembinaan Kesejahteraan Keluarga”.

⁴ Julia Suryakusuma, *Agama, Seks, dan Kekuasaan*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 178.

Pemilihan periode dari tahun 1956 hingga tahun 1982 merujuk pada dimulainya masa kerja DPRD hasil pemilu 1955 serta akhir periode DPRD DIY yang diangkat tahun 1977. Pemilihan batas tahun kajian pada 1982 juga dikuatkan dengan Hill Hal dan Jamie Mckie yang menyebutkan bahwa tahun 1983 menjadi akhir tahap kedua model pemerintahan Suharto.⁵

Kata Eksistensi dipilih karena dianggap sebagai kata yang tepat untuk menggambarkan upaya penelusuran proses keberadaan perempuan di DPRD DIY dan hal yang dilakukan ketika menjabat. Eksistensialisme berarti menjadi ada secara aktual dan diakui. Eksistensialisme membedakan antara esensi dan eksistensi dan lebih mengutamakan eksistensi. Namun demikian, perlu diingat bahwa ada secara ragawi belum tentu berarti *eksist* karena untuk menjadi ada manusia membutuhkan kesadaran.

⁵ Julia Suryakusuma, *op. cit.*, hlm. 260.

⁶ Gadis Arivia, “Sukarno dan Gerakan Perempuan, Kepentingan

B. Perbandingan Era Sukarno dan Suharto

Dalam pelbagai kesempatan Sukarno selalu mengajak perempuan untuk aktif dalam gerakan. Sebagai contoh pidato Sukarno di Kongres Kaum Ibu 2 Desember 1928, Sukarno mengajak kaum ibu untuk berjuang bersama melawan penjajahan karena kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak akan cukup. Ada kebutuhan yang lebih besar lagi, yaitu perjuangan kemerdekaan dengan melawan para penjajah.⁶

Setelah Indonesia merdeka, Sukarno mengamati bahwa posisi perempuan masih terjepit meskipun telah berjuang melawan penjajah. Laki-laki masih memiliki strata yang lebih tinggi dari perempuan di masyarakat. Padahal, Sukarno menginginkan terwujudnya masyarakat yang adil gender. Meski memang terdapat perbedaan antara tubuh laki-laki dan perempuan, semangat dan kecerdasan antara perempuan dan laki-laki adalah sama.⁷

Bangsa Vs Kepentingan Perempuan”, *Kompas*, 1 Juni 2001.

⁷ Sukarno, *Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perdjoangan*

Pemikiran Sukarno mengenai keikutsertaan perempuan dalam politik juga dapat dicermati dari pidato berikut.

...Ya, revolusi Indonesia ini juga revolusi wanita. Wanita Indonesia sekarang, lain dalam alam pikirannya, dalam tindak-tanduknya, dalam kehendak-kehendaknya, dalam *outlook*-nya daripada wanita jang dahulu... Revolusi kita terus berjalan, oleh karena kaum wanita ikut berjuang... wanita Indonesia selalu ikut bergerak, berdentam kakinya di dalam barisan revolusioner Indonesia... Kalau membandingkan wanita Indonesia dengan wanita-wanita lain, kita tidak kalah, saudara-saudara. Ya, saya sudah keliling negeri, saya sudah melihat di negeri-negeri lain. Kedudukan wanitanya tidak seperti wanita Indonesia.⁸

Agitasi Sukarno terhadap perempuan untuk terjun dalam politik tentu membawa angin segar bagi

gerakan perempuan di Indonesia. Cukup banyak organisasi perempuan yang tumbuh dan berkembang. Sebagai contoh, Wanita Marhaen yang merupakan sayap politik dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Kongres Wanita Indonesia (KWI), dan Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari).⁹

Di Yogyakarta, kesadaran para perempuan untuk berorganisasi dan terjun ke ranah politik bisa dibuktikan dengan banyaknya organisasi perempuan yang lahir di Yogyakarta, seperti Wanita Taman Siswa, Aisyiyah, serta pelaksanaan Kongres Wanita Indonesia I yang dilaksanakan di Yogyakarta jauh sebelum kemerdekaan. Tingginya angka perempuan yang telah mengenyam pendidikan barat menjadi salah satu faktor majunya gerakan perempuan di Yogyakarta,¹⁰ baik parlementer maupun non-parlementer. Keaktifan

Republik Indonesia, (Yogyakarta: Oesaha Penerbitan Guntur, 1947), hlm. 30-33.

⁸ Sukarno, (1964), *op. cit.*, hlm. 9-11.

⁹ Nina Andriana, "Sejarah Gerakan Politik Perempuan di

Indonesia", *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen*, (Jakarta: LIPI, 2012), hlm. 24.

¹⁰ Anton E. Lucas, "Wanita dalam Revolusi: Pengalaman Selama Pendudukan dan Revolusi 1942-1950", *Prisma* 5, Mei 1996, hlm. 19.

gerakan perempuan ini membuktikan bahwa pada era Sukarno, akses perempuan terdidik untuk terjun ke dunia politik cukup terbuka.

Gerak politik perempuan dalam parlemen Yogyakarta sendiri dapat dilihat dari pemilu pertama yang diselenggarakan Yogyakarta pada 1951¹¹. Dari pemilu pertama ini, Siti Zaenab Damiri, anggota perempuan dari Masyumi, berhasil menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY) pertama.

Kebijakan Suharto mengenai perempuan, khususnya pembinaan, diwujudkan dalam beberapa organisasi, seperti Dharma Wanita dan PKK yang dibentuk tahun 1974.¹² Melalui lembaga inilah, Suharto menanamkan serta menekankan peran perempuan sebagai ibu dan istri yang patuh, dan menurut Julia Suryakusuma merupakan upaya penjinakan perempuan dengan ibuisme negara.

Orde Baru memandang perempuan sebagai kelompok penting masyarakat yang terstruktur, yang perlu ditarik segaris dengan pembangunan. Perempuan perlu menjalankan perannya dalam memastikan kestabilan sosial, menerapkan rencana pembangunan, dan mengurangi angka kelahiran. Pada tahun awal rezim ini, perempuan semata-mata dipandang sebagai istri dan ibu.¹³ Dharma Wanita, dalam hal ini menjadi alat Orde Baru untuk memastikan bahwa perempuan berjalan di garis yang sama dengan pembangunan.

Pada 5 Agustus 1974 Dharma Wanita secara resmi didirikan. Jika awalnya Dharma Wanita adalah federasi dari organisasi-organisasi istri pegawai yang berdiri sendiri tanpa mengikuti struktur suaminya, pada 1979 organisasi-organisasi istri dihapuskan seluruhnya dan hanya ada organisasi tunggal, yakni Dharma

¹¹ Penyelenggaraan Pemilu di daerah merupakan upaya pemerintah untuk melakukan uji coba pemilu.

¹² Julia Suryakusuma, *op. cit.*, hlm. 178.

¹³ Susan Blackburn, *Perempuan dan Negara dalam Era Indonesia Moderen*, (Jakarta: Kalyanamitra, 2009), hlm. 44-45.

Wanita. Dharma Wanita adalah perwujudan dari ibuisme negara dengan struktur cerminan dari hierarki laki-laki. Dengan demikian kaum perempuan dicetak mengikuti budaya “ikut suami” yang merupakan salah satu ciri pokok ibuisme negara.¹⁴ Adapun isi dari Panca Dharma Wanita adalah sebagai berikut.

1. Sebagai istri dan pendamping suami.
2. Sebagai pendidik dan pembina generasi muda.
3. Sebagai ibu pengatur rumah tangga.
4. Sebagai pekerja yang menambah penghasilan keluarga.
5. Sebagai anggota organisasi masyarakat khususnya organisasi perempuan dan organisasi sosial.¹⁵

Ibuisme negara sebagai politik seksualitas yang digunakan Orde Baru

dengan sengaja membentuk konstruksi tentang perempuan ideal yang dijabarkan dalam Panca Dharma Wanita. Perempuan, dalam hal ini sudah tidak dianggap sebagai rekan seperjuangan seperti ketika menghadapi penjajahan tetapi diposisikan sebagai seorang istri yang submisif dan ibu yang baik. Untuk mencapai tujuan ini, seksualitas dan ruang gerak perempuan juga dikontrol. Pengontrolan politik seksual yang dilakukan Orde Baru mencakup tubuh, mental, simbol, hingga estetika.¹⁶

Pola ketergantungan perempuan terhadap laki-laki menjadi semakin kuat dengan munculnya organisasi Dharma Wanita dan PKK. Padahal pada masa sebelum organisasi istri ini muncul, organisasi perempuan bersifat mandiri, yakni keanggotaan para perempuan datang sebagai dirinya sendiri, bukan atas nama suami. Lewat struktur sosial, ekonomi, politik,

¹⁴ Julia Suryakusuma *Ibuisme Negara*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), hlm. 17-22.

¹⁵ A P Muniarti, “Perempuan Indonesia dan Pola Ketergantungan”, *Citra Wanita dan Kekuasaan Jawa*, (Yogyakarta: Isis, 1992), hlm. 27.

¹⁶ Saskia Eleonora Wieringa, “The Birth of The New Order State in Indonesia: Sexual Politic and Nationalism”, *Stri: Jurnal Studi Wanita*, Vol. 1 No. 1 Januari 2002, hlm. 56.

budaya perempuan Indonesia diatur dengan “rekayasa pola” dan keseragaman tentang perempuan. Hal ini menyebabkan pandangan tentang stereotip perempuan tetap melekat sehingga perempuan sulit berkembang sebagai pribadi.¹⁷

Dengan adanya organisasi perempuan yang bergantung pada struktur laki-laki, terdapat pemisahan yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berada di ruang politik untuk bersaing mendapat kekuasaan sedangkan perempuan tanpa perlu bersaing telah mendapatkan posisi selayaknya suami mereka. Negara juga tidak mengakui para perempuan yang bekerja dengan menyebut penghasilan istri adalah penghasilan tambahan meskipun bila jumlahnya lebih besar dari penghasilan suami atau memiliki kontribusi besar dalam perekonomian keluarga. Suharto sendiri yang kala itu adalah seorang presiden, dalam strategi politik seksualnya, menempatkan diri sebagai bapak

pembangunan dan bapak dari sebuah negara. Strategi ini, membuat Suharto menjadi super-patriarki. Lembaga-lembaga negara, politik, serta urusan pembangunan berada di tangan laki-laki sedangkan perempuan mengurus masalah sosial dan moral.¹⁸ Secara politik organisasi istri bentukan pemerintah bernada militeristis dan paternalistis, berperan sebagai pengumpul suara dalam pemilihan umum, mengkooptasi dan mendominasi organisasi-organisasi wanita lain, membuat wanita mempunyai ketergantungan politik dan keuangan, serta mensubordinasikan kembali kaum wanita.¹⁹

Ideologi gender yang didukung oleh negara juga terwujud secara konkret dalam Repelita yang di dalamnya selalu memuat tentang “peranan wanita dalam pembangunan”. Perempuan selain menjadi istri dan ibu yang baik juga diminta untuk turut serta dalam pembangunan negara. Konsep peran

¹⁷ A P Muniarti, *op. cit.*, hlm. 26-28.

¹⁸ Saskia Eleonora Wieringa (2002), *op. cit.*, hlm. 54-57.

¹⁹ Julia Suryakusuma (2013), *op. cit.*, hlm. 23.

ganda menjadi jelas jika membandingkan Dokumen Repelita dengan Panca Dharma Wanita. Konsep ini dimaksudkan sebagai unsur baru yang progresif, yang mengakui bahwa perempuan memiliki hak dan kebutuhan berperan di luar keluarga.²⁰ Akan tetapi, kembali pada Dharma Wanita dan PKK, perempuan harus mengurus rumah sebagai urusan utama.

C. Anggota DPRD DIY Terpilih

Beberapa anggota partai, tertarik untuk menjadi anggota DPRD karena prestise atau imbalan keuangannya. Pada 1969 gaji anggota DPRD DIY mencapai dua ribu untuk anggota biasa dan tiga ribu rupiah untuk ketua. Sedangkan tahun 1971 gaji anggota DPRD meningkat menjadi enam ribu hingga 9.500 rupiah. Uang ini belum termasuk uang sidang, presensi, dan uang jalan yang diterima setiap kali anggota DPRD mengikuti sidang. Ditambah lagi dengan uang peninjauan yang dihitung harian tergantung jarak rumah anggota dewan

ke kantor DPRD DIY. Bila jarak rumah lebih dari 30 KM maka akan mendapatkan imbalan lima ratus rupiah. Jika dalam sebulan anggota DPRD dapat memaksimalkan kinerjanya, maka mereka berhak mendapatkan uang pendapatan tambahan sebanyak dua ribu rupiah pada 1969 dan 4.750 rupiah pada 1971. Sebagai perbandingan, pada Januari 1971 rata-rata upah minimum pegawai negeri adalah 3.800 rupiah, harga emas 24 karat pada Agustus 1971 adalah 550 rupiah per 1 gram, sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika adalah 378 rupiah per 1 dollar.

Ada pula yang mengajukan diri sebagai anggota DPRD sebagai jalan untuk menuju jabatan pemerintahan yang diinginkan atau didesak oleh anggota lain untuk mencalonkan diri karena memiliki kualitas sebagai wakil partai dalam DPRD. Kriteria pendidikan, kemampuan, dan kualitas pribadi menjadi modal bagi para bakal calon wakil partai.²¹ Para calon tidak diharuskan untuk mengenyam

²⁰ *Ibid.*, hlm. 18-19.

²¹ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Terj.,

(Yogyakarta: UGM Press, 1986), hlm. 161.

pendidikan formal asalkan mereka bisa berbahasa Indonesia, membaca, menulis huruf latin. Meskipun pada pemilihan di era Sukarno dan Suharto para calon belum diharuskan untuk memiliki pendidikan formal, rata-rata calon sudah mengenyam pendidikan formal.

Pada pemilu 1955, PKI berhasil menjaring suara para petani dan rakyat kecil ketika PNI menjadi partai pilihan mayoritas elite di ibukota. Hasil pemilihan DPRD DIY 1955 menghasilkan PKI sebagai pemilik suara terbanyak dengan mendapatkan 10 kursi, baru setelah itu PNI 8 kursi, Masyumi, Gerinda, dan lain-lain.²²

Calon-calon yang akan menduduki kursi ditunjuk oleh partai yang bersangkutan. Partai politik memiliki kekuasaan untuk menunjuk wakilnya yang dianggap kompeten. Pemilih memilih partai dan menyerahkan kepada partai untuk menunjuk wakil-wakilnya dalam

DPRD. Di tiap partai biasanya sudah memiliki daftar bakal calon anggota partai yang akan masuk ke DPRD DIY. Jadi sebenarnya, partai politiklah yang menentukan kualitas DPRD bukan para pemilih.²³ Begitu juga dengan kuasa untuk menarik atau mengganti anggota yang tidak sejalan dengan keinginan partai. Dengan adanya kuasa ini, pergantian formasi menjadi biasa terjadi. Beberapa partai politik membuat kebijakan dengan menaruh wakilnya secara bergantian namun ada juga yang menjabat bertahun-tahun karena dianggap kompeten. Pada susunan DPRD DIY tahun dinas 1956, terdapat nama Anisah Djufrie dan Siti Zaenab Damiri yang duduk di DPRD DIY. Anisah Djufrie dan Siti Zaenab Damiri datang dari Masyumi, Siti Zaenab Damiri berasal dari Aisyiyah sedangkan Anisah Djufrie dari Wanita NU.²⁴ DPRD hasil pemilu 1955 mulai

²² DPRD DIY, *Statistik Selama Enam Tahun Anggota DPRD DIY dalam 3 Fase*.

²³ Selo Soemardjan, *op. cit.*, hlm. 160.

²⁴ *Surat Keputusan DPRD DIY No. 1/K/DPR/1956, 31 Januari 1956, Tentang Susunan Urusan dan Kenggotaan Seksi-Seksi DPRD Tahun 1956*, Yogyakarta: Perpustakaan DPRD DIY.

bekerja pada 24 Desember 1955 hingga 17 Maret 1958.²⁵

Pemilihan kali ini diselenggarakan pada 7 November 1957 berdasarkan Peraturan Daerah No. 3/1957.²⁶ Dalam pemilihan umum ini, PKI lagi-lagi keluar sebagai pemenang dan memperoleh jatah kursi sebanyak 14. Pada periode ini Masyumi masih menunjuk Siti Zaenab Damiri sebagai salah satu wakil Masyumi namun mengeluarkan Anisah Djufrie dari daftar wakil fraksi di DPRD DIY.

Pada November 1960, melalui Surat Keputusan No. 24/K/DPRD/1960 tentang pembentukan DPRD GR DIY terjadi perombakan dalam tubuh legislatif DIY.²⁷ Dalam surat keputusan tersebut, diputuskan bahwa DPRD DIY harus dibersihkan dari elemen-elemen anti-Manipol/Usdek dan kontra-revolusi. Aturan tersebut ditambah pula dengan keputusan

presiden pada 1960 untuk membubarkan Masyumi dan PSI karena dianggap terlibat pemberontakan di Sumatera. Atas dasar aturan tersebut, maka pada 1961 dibentuklah susunan baru legislatif tanpa menyelenggarakan pemilu tetapi dengan melakukan penunjukan oleh kepala daerah setempat.

Beberapa orang di antara yang mengajukan diri menjadi calon anggota DPRD GR DIY tahun dinas 1961 adalah Nyonya Sri Suliyah Subari, Nyonya Rukinah, dan Pastur Floribertus Sunarsa Wignyaprasetya. Sri Suliyah Subari merupakan seorang guru tamatan Deisjes Normaal School yang mengajukan diri menjadi calon anggota DPRD melalui Partai Katolik. Saat mengajukan diri, Sri Suliyah Subari berusia 40 tahun. Ia aktif di organisasi perempuan Partai Katolik, yakni Wanita Katolik dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) daerah

²⁵ DPRD DIY, *loc. cit.*

²⁶ *Peraturan Daerah No. 3/1957*, 29 Agustus 1957, Tentang Penetapan Waktu Pemungutan Suara bagi Pemilih Umum untuk Pemilihan Anggota DPRD DIY Tahun Pemilihan

1957, Yogyakarta: Perpustakaan DPRD DIY.

²⁷ *Surat Keputusan DPRD DIY No. 24/K/DPRD/1960*, 16 November 1960, Tentang Pembentukan DPRD GR DIY, Yogyakarta: Perpustakaan DPRD DIY.

Yogyakarta.²⁸ Ada pula Nyonya Rukinah, seorang anggota Gerwani yang mengajukan diri menjadi calon anggota DPRD GR DIY. Saat mengajukan diri Rukinah berusia 33 tahun, tamatan Sekolah Rakyat dan bekerja sebagai pegiat seni, khususnya ketoprak. Rukinah merupakan Ketua I Badan Kontak Organisasi Ketoprak Seluruh Indonesia. Pada masa perang mempertahankan kemerdekaan, ia merupakan staf penerangan di Markas Besar Komando Djawa.²⁹

Calon lain yang mengajukan diri menjadi anggota DPRD GR DIY tahun dinas 1961 adalah Pastur Floribertus Sunarsa Wignyaprasetya. Saat mengajukan diri menjadi anggota DPRD GR DIY, Floribertus berusia 39 tahun. Ia merupakan pastur bergelar doktor filsafat dan sarjana teologi, telah mengenyam pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri, yakni Belanda, Inggris, dan Roma. Ketika mengajukan diri, Floribertus

merupakan pemimpin asrama mahasiswa Realino Yogyakarta dan sebelumnya merupakan pengajar di SMA Johannes De Brito, Yogyakarta.³⁰ Tiga orang tersebut, bersama calon-calon lain berada dalam daftar calon anggota DPRD GR DIY. Namun, tiga orang itu juga tidak berhasil menjadi anggota DPRD GR DIY tahun dinas 1961 karena susunan tidak berubah drastis, hanya menggantikan kursi-kursi kosong karena pemberhentian anggota dari fraksi Masyumi. Dalam susunan legislatif yang baru, jumlah perempuan yang hadir sebagai wakil fraksi juga berjumlah empat orang dan hampir sama seperti periode sebelumnya, hanya saja Siti Zaenab Damiri dari Masyumi telah dikeluarkan. PNI kemudian mengikuti jejak beberapa partai politik lainnya dengan menunjuk perempuan sebagai wakil partai, yakni Nyonya Sahir Nitihardjo.³¹

²⁸ BPAD DIY, *Riwayat Hidup Nyonya Sri Suliyah Subari*, Yogyakarta, 14 November 1960.

²⁹ BPAD DIY, *Riwayat Hidup Nyonya Rukinah*, Yogyakarta 6 Januari 1961.

³⁰ BPAD DIY, *Riwayat Hidup Floribertus Sunarsa Wignyaprasetya*, Yogyakarta 15 Januari 1961.

³¹ *Surat Keputusan DPRD DIY No. 1/K/DPRD/1961, 8 Februari 1961, Tentang Susunan Anggota*

Pada 1964, perubahan susunan kembali terjadi, Angkatan Darat, Kepolisian, dan golongan fungsional mulai muncul dalam tubuh legislatif. Kemunculan militer, kepolisian, dan golongan fungsional merupakan salah satu ide Sukarno untuk menekan dominasi partai politik. Meski begitu, PKI masih menjadi pemilik kursi terbanyak di legislatif, yakni sebanyak 8 dari 45 total anggota legislatif, sedangkan PNI 4 orang. Dari 45 orang anggota tersebut, terdapat lima orang perempuan yang duduk di legislatif selama 1964 hingga meletusnya peristiwa G30S. Mereka adalah S Partoatmodjo dari PKI, Sahir Nitihardjo dari Wanita Demokrat, A Musadad dari Wanita Islam, Thr. Sumarto dari Wanita Katolik, dan S Efendi dari Gerwani.³² Tahun 1964 merupakan pertama kali wakil dari Gerwani duduk di kursi legislatif sebagai Golongan Fungsional mengingat Gerwani memutuskan

Seksi-Seksi DPRD Tahun Dinas 1961, Perpustakaan DPRD DIY.

³² *Surat Keputusan DPRD GR DIY No. 2/K/DPRD GR/1964, 30 Januari 1964, Tentang Pembagian Pekerjaan dan Susunan Anggota Seksi-Seksi DPRD GR DIY Tahun*

bergabung dengan PKI baru pada awal 1965.

Pembersihan di tubuh legislatif Yogyakarta dilakukan dengan mengeluarkan 14 orang anggota yang berasal dari PKI atau organisasi yang berafiliasi dengan PKI dan seorang dari Partai Murba. Dari 14 orang yang dikeluarkan, dua di antaranya merupakan anggota pengganti yang belum sempat dilantik. Dua orang tersebut adalah Nona Muwarni, yang seharusnya menggantikan posisi Sutikno, dan Ir. Munadji yang menggantikan posisi Prof. Ir. S Purbodiningrat. Selain itu, terdapat satu kursi dari Partindo yang tidak terisi sehingga sisa anggota legislatif yang tidak mengalami pembersihan ada 29 orang.³³ Pengangkatan anggota DPRD GR DIY dilakukan pada 20 Oktober 1966 berdasarkan Keputusan Kepala Daerah No. III/1966. Dari 30 orang yang diangkat, 13 berasal dari Golongan Politik dan 17 dari

Dinas 1964, Yogyakarta: Perpustakaan DPRD DIY.

³³ BPAD DIY, *Laporan Penyempurnaan dan Penyegaran DPRD GR DIY No. 807/I/A/I/1966.*

Golongan Karya. Namun selang enam hari, yakni pada 26 Oktober 1966, diadakan *open-talk* yang dipimpin oleh Komandan Korem 072/Pekuper Yogyakarta/Kedu. Dalam pertemuan tersebut terjadi pembahasan tentang perubahan susunan anggota DPRD GR DIY yang baru disahkan pada 20 Oktober 1966. Hasil dari pertemuan tersebut memutuskan bahwa 27 orang wakil berasal dari Golongan Politik dan 21 orang berasal dari Golongan Karya.³⁴ Penunjukan person anggota DPRD DIY dilakukan oleh masing-masing fraksi sesuai dengan jumlah kursi yang telah ditentukan.

Perubahan struktur yang terjadi hanya dalam 6 hari ini kemungkinan karena adanya protes dari partai politik sebab jumlah kursi mereka yang sangat sedikit, sedangkan Golkar menguasai lebih dari separuh kursi DPRD DIY. Dengan begitu, bila terjadi perdebatan atau bahkan pengambilan suara dalam rapat, Golkarlah yang akan selalu menang karena jumlah mereka lebih dari setengah. Perubahan komposisi dalam DPRD dengan 27 partai politik dan 21

orang berasal dari Golkar juga sebetulnya akan menghasilkan hal yang sama. Golkar memang tidak menguasai separuh atau lebih dari separuh, meskipun hanya “hampir setengah” dari seluruh anggota DPRD, suara Golkar dalam rapat akan sulit untuk dilawan. Pasalnya, 27 orang wakil dari fraksi yang berbeda bisa saja tidak memiliki pendapat yang sama, oleh karena itu Golkar tetap akan menang dalam perdebatan di dalam DPRD DIY. Dari sini, bisa dilihat bagaimana pemerintahan baru berupaya untuk mengontrol segala gerak-gerik yang terjadi di DPRD DIY melalui penguasaan kursi DPRD oleh Golkar. Selain itu, Ketua Sekber Golkar wilayah DIY yang berasal dari militer, yakni Letkol Soedjono AJ. Munculnya militer sebagai pemimpin dalam pembahasan mengenai susunan anggota DPRD DIY membuktikan bahwa militer memiliki peran yang kuat dalam bidang politik di era Suharto.

Pada 1971, pemilu akhirnya kembali dilaksanakan setelah 16 tahun DPRD dipilih melalui penunjukan dan

³⁴ BBPAD DIY, *Laporan Mengenai Follow Up Penyempurnaan*

dan Penyegaran DPRD GR DIY No. 1448/L/GR/1966, 26 Oktober 1966.

pengangkatan. Penyelenggaraan Pemilu 1971 diatur sesuai dengan UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.³⁵ Dalam UU dicantumkan bahwa seorang calon anggota DPRD DIY sekurang-kurangnya harus bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, bisa membaca, dan menulis huruf latin. Lebih lanjut, kecakapan ini harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor/Dinas Inspeksi Pendidikan dan Kebudayaan. Selain syarat tersebut, para calon anggota juga harus melampirkan surat keterangan bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau tidak terlibat dalam G-30-S. Surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh Komandan Resort Polri.³⁶

Selain penyelenggaraan pemilu, pemerintah juga menghapus “Gotong

Royong” dari nama dinas DPR di semua tingkatan. Hasil pemilu didominasi oleh Golkar yang berhasil menguasai mayoritas kursi dan menempatkan tiga orang perempuan sebagai wakil partai di legislatif, yakni BRA Retno Dewajani, Sri Suliyah Subari, dan RA Sosrodiningrat. Jika melihat lagi ke belakang, Sri Suliyah Subari sudah mengajukan diri menjadi anggota DPRD DIY sejak 1961, yakni ketika dibentuknya DPRD GR DIY. Kala itu ia masuk melalui Wanita Katolik, organisasi perempuan sayap dari Partai Katolik, namun ia baru berhasil terpilih di tahun 1971, yang berarti ia menjadi anggota DPRD di usia 50 tahun. Selain Golkar, Demokrasi Pembangunan juga mengirimkan perempuan sebagai salah satu wakilnya dalam legislatif, ialah Tisniarti, Bsc.³⁷

Pada pemilu 1977, setelah pemerintah melakukan

³⁵ *Undang-Undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Pasal 16 ayat b.*

³⁶ *Pedoman Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 56/LPU/ Tahun 1970*

tentang Tata Cara Pengajuan Calon-Calon bagi Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II, serta kegiatan-kegiatan lanjutannya.

³⁷ *Surat Keputusan DPRD DIY No. 13/K/DPRD/1971, 29 Desember 1971, Tentang Pembagian Pekerjaan dan Susunan Keanggotaan Komisi-*

penyederhanaan partai politik, Golkar keluar sebagai pemegang mayoritas suara. Dari total 39 kursi legislatif DIY, Golkar menguasai 19 kursi, Golkar dari ABRI menguasai 6 kursi, Golkar bukan ABRI menguasai 2 kursi, PDI 5 kursi, dan PPP 7 kursi. Dari seluruh anggota, hanya terdapat 3 orang perempuan yang duduk di legislatif. Perempuan-perempuan ini ialah Kus Retno Juliastuti, Nurchayati Dandung, dan Kantini Widodo yang kesemuanya merupakan anggota fraksi Golkar. Susunan DPRD hasil pemilu 1977 melaksanakan tugasnya hingga pelaksanaan pemilu berikutnya, yakni pada 1982.³⁸

D. Posisi Perempuan di DPRD DIY

Di DPRD pembagian kerja dibagi dalam tiap seksi yang mengurus masalah sesuai bidang yang telah ditentukan. Pembagian bidang kajian ini, umumnya pemerintahan umum,

urusan sosial, pertanian, perekonomian, dan pekerjaan umum.³⁹

Adapun nama dan jumlah seksi berubah sesuai keputusan pemimpin daerah dan kebutuhan sesuai zaman.

Sepanjang 1955-1961 kebanyakan para perempuan anggota DPRD DIY duduk di Seksi II yang membidangi urusan sosial dan lain-lain. Perempuan-perempuan ini adalah Zaenab Damiri, Anisah Djufrie, Nyonya S Partoatmodjo, Nyonya A Musadad, dan Nyonya Sahir Nitihardjo. Adapun perempuan yang duduk di Seksi Kesejahteraan Rakyat tahun dinas 1964-1965 adalah S Partoatmodjo, Sahir Nitihardjo, dan A Musadad. Sedangkan perempuan yang duduk di Seksi Produksi dan Tenaga Kerja adalah Thr. Sumarto dan S Efendi yang datang dari Gerwani. Theresia Sumarto merupakan perempuan yang paling aktif di PRD DIY di era Sukarno. Semasa menjabat, Theresia Sumarto selain menjadi satu-

Komisi DPRD DIY, Perpustakaan DPRD DIY.

³⁸ DPRD DIY, *Hasil Kerja DPRD DIY 1977-1982*, (Yogyakarta: Sekretariat DPRD DIY, 1982), hlm. 25-30.

³⁹ BPAD DIY, *Surat Keputusan DPRD DIY No. 1/K/D.P.R.D/1961*, Tentang Susunan Anggota Seksi-Seksi DPRD Tahun Dinas 1961.

satunya anggota perempuan yang duduk di Seksi III, dia juga pernah menjadi panitia otonomi DPRD DIY bersama Alimu Hardjodisastro dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Sunarjohadi dari PNI.⁴⁰

Mayoritas perempuan yang duduk di DPRD DIY era Sukarno berada di seksi yang merungsi bidang sosial dan kesejahteraan. Keputusan partai yang menempatkan para perempuan di Seksi II kemungkinan karena perempuan dianggap dekat dengan persoalan-persoalan sosial. Perlu diingat bahwa para perempuan anggota DPRD datang dari organisasi perempuan sayap partai yang semula diciptakan untuk menyelenggarakan kegiatan sosial di luar partai.

Di era Suharto penempatan perempuan tidak hanya fokus di satu komisi yang mengurus sosial dan kesejahteraan. Di era ini, penempatan anggota perempuan cenderung menyebar di beberapa komisi. RA Sosrodiningrat duduk di Komisi C yang mengurus produksi, Nona Tisniarti dan Kus

Retno Juliastuti duduk di yang membidangi masalah Ekonomi sedangkan Nurchayati Dandung duduk di komisi yang mengurus pembangunan. Perempuan yang duduk di tim kerja yang mengurus kesejahteraan rakyat di era Suharto adalah Nyonya Supadi, Sumartinah, BRA Retno Dewajani, Sri Suliyah Subari, dan Kantini Widodo.

Sri Kantini Widodo Subarno atau Kantni Widodo, salah seorang anggota DPRD DIY 1977-1982, mulanya duduk di Komisi E menjabat sebagai wakil ketua. Namun beberapa bulan berselang, ia naik menjadi ketua komisi E. Selain Kantini ada pula Tisniarti yang menjabat sebagai wakil ketua pada 1971-1977. Berdasarkan penuturan dari Kantini, meskipun jumlah perempuan di eranya tidak sebanyak anggota laki-laki, tidak ada diskriminasi atau tindakan yang memandang rendah posisi perempuan di DPRD DIY. Hal ini ia buktikan dengan posisinya sebagai ketua komisi, juga di periode sebelumnya,

⁴⁰ *Surat Keputusan DPRD DIY No. 16/K/DPRD/1960, 5 Juli 1960, Tentang penetapan saudara-saudara Ny. Thr. Sumarto, Alimu*

Hardjodisastro, dan Sunarjohadi menjadi anggota Panitia Otonomi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nona Tisniarti juga menjabat sebagai wakil ketua komisi. Meski begitu, perempuan tidak memiliki peranan yang cukup besar dalam menyuarakan isu-isu perempuan atau mengusulkan peraturan daerah yang ramah untuk perempuan.

E. Kesimpulan

Pada masa pemerintahan Sukarno ruang gerak perempuan untuk terjun ke politik sangat terbuka. Banyak organisasi perempuan sangat aktif dan banyak pula pembentukan organisasi perempuan sayap partai. Namun semua berakhir pasca G30S. Peta perpolitikan nasional kemudian berubah dan masuklah era transisi dari Sukarno ke Suharto. Di era Suharto, posisi militer sangat kuat dan selalu berupaya untuk melemahkan kekuatan politik dengan berbagai manuver. Ruang gerak perempuan ditekan dengan ibuisme negara agar perempuan menjadi ibu yang baik dan istri yang patuh, ditambah dengan beban ganda untuk turut andil dalam pembangunan negara.

Pada proses terpilihnya perempuan menjadi anggota dewan di era Sukarno, gerakan perempuan yang

memiliki kedekatan dengan partai politik ataupun organisasi perempuan sayap partai, mempunyai peranan besar bagi para perempuan untuk masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY). Di masa Sukarno, tercatat Aisyiyah, Wanita Nahdlatul Ulama (NU), Wanita Katolik, Gerwani, dan Wanita Marhaenis menjadi jalan bagi perempuan untuk masuk ke DPRD DIY. Mereka berturut-turut adalah Zaenab Damiri, Anisah Djufrie dan Nyonya A Musadad, Thr. Sumarto, S Efendi, dan Sahir Nitihardjo, sedangkan Nyonya S Partoatmodjo menjadi satu-satunya perempuan yang mewakili fraksi PKI di DPRD DIY. Pada masa presiden Sukarno, pengangkatan anggota DPRD DIY dilakukan melalui penunjukan. Pemilihan hanya dilaksanakan 3 kali di Yogyakarta, sekali melaksanakan pemilu nasional pada 1955, sedangkan pilkada DIY diselenggarakan dua kali, yakni 1951 dan 1957. Pemilihan dilakukan dengan memilih partai, kemudian partai akan memberikan daftar calon utama dan calon cadangan yang akan masuk ke DPRD DIY. Pasca G30S/PKI terdapat

setidaknya 14 orang anggota DPRD DIY yang diberhentikan karena dianggap terkait dengan G30S. Pembersihan terhadap anggota DPRD DIY tahun dinas 1965 ini menjadi akhir dari DPRD DIY di era Sukarno. Hingga berakhirnya era Sukarno pada 1965, ada 7 orang perempuan yang menjadi anggota legislatif serta terdapat kecenderungan untuk menjabat dalam waktu yang lama. Militer terus mendominasi selama masa pemerintahan Suharto. Di tahun 1977, tidak hanya militer, tetapi istri-istri tentara dan pegawai negeri yang biasanya tergabung dalam organisasi istri, seperti PIA Ardhya Garini, Persit Kartika Candra Kirana juga Dharma Wanita, ditugaskan untuk masuk ke politik. Golkar sebagai partai milik pemerintah menjadi kendaraan para istri abdi negara untuk terjun ke politik. Kantini Widodo yang datang dari organisasi istri angkatan udara, PIA Ardhya Garini, masuk melalui Golkar. Sejak masa transisi hingga 1982, jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD DIY tercatat ada 9 orang, dengan 2 orang berasal dari partai selain Golkar, yakni PNI dan Demokrasi Pembangunan.

Perempuan yang menjabat di era Suharto cenderung berganti di setiap periode. Terjunnya para perempuan di era Sukarno-Suharto ke ranah politik ternyata tidak memiliki banyak pengaruh.

Daftar Pustaka

Arsip

- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Laporan Mengenai Follow Up Penyempurnaan dan Penyegaran DPRD GR DIY No. 1448/L/GR/1966*, 26 Oktober 1966.
- _____, *Laporan Penyempurnaan dan Penyegaran DPRD GR DIY No. 807/I/A/I/1966*.
- _____, *Riwajat Hidup Floribertus Sunarsa Wignyaprasetya*, Yogyakarta 15 Januari 1961.
- _____, *Riwajat Hidup Nyonya Rukinah*, Yogyakarta 6 Januari 1961.
- _____, *Riwajat Hidup Nyonya Sri Suliyah Subari*, Yogyakarta, 14 November 1960.
- _____, *Surat Keputusan DPRD DIY No. 1/K/D.P.R.D/1961*, Tentang Susunan Anggota Seksi-Seksi DPRD Tahun Dinas 1961.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Hasil Kerja DPRD DIY 1977-*

- 1982, Yogyakarta: Sekretariat DPRD DIY, 1982.
- _____, *Statistik Selama Enam Tahun Anggota DPRD DIY dalam 3 Fase*.
- Pedoman Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 56/LPU/Tahun 1970* tentang Tata Cara Pengajuan Calon-Calon bagi Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II, serta kegiatan-kegiatan lanjutannya.
- Peraturan Daerah No. 3/1957, 29 Agustus 1957*, Tentang Penetapan Waktu Pemungutan Suara bagi Pemilih Umum untuk Pemilihan Anggota DPRD DIY Tahun Pemilihan 1957, Yogyakarta: Perpustakaan DPRD DIY.
- Surat Keputusan DPRD DIY No. 1/K/DPR/1956, 31 Januari 1956*, Tentang Susunan Urusan dan Kenggotaan Seksi-Seksi DPRD Tahun 1956, Yogyakarta: Perpustakaan DPRD DIY.
- Surat Keputusan DPRD DIY No. 1/K/DPRD/1961, 8 Februari 1961*, Tentang Susunan Anggota Seksi-Seksi DPRD Tahun Dinas 1961, Perpustakaan DPRD DIY, (lih. Lampiran 4, hlm. 132).
- Surat Keputusan DPRD DIY No. 13/K/DPRD/1971, 29 Desember 1971*, Tentang Pembagian Pekerjaan dan Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD DIY, Perpustakaan DPRD DIY.
- Surat Keputusan DPRD DIY No. 16/K/DPRD/1960, 5 Juli 1960*, Tentang penetapan saudara-saudara Ny. Thr. Sumarto, Alimu Hardjodisastro, dan Sunarjohadi menjadi anggota Panitia Otonomi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Surat Keputusan DPRD DIY No. 24/K/DPRD/1960, 16 November 1960*, Tentang Pembentukan DPRD GR DIY, Yogyakarta: Perpustakaan DPRD DIY.
- Surat Keputusan DPRD GR DIY No. 2/K/DPRD GR/1964, 30 Januari 1964*, Tentang Pembagian Pekerjaan dan Susunan Anggota Seksi-Seksi DPRD GR DIY Tahun Dinas 1964, Yogyakarta: Perpustakaan DPRD DIY.
- Undang-Undang No. 15 tahun 1969* tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
- Buku**
- Blackburn, Susan., *Perempuan dan Negara dalam Era Indonesia Moderen*, Jakarta: Kalyanamitra, 2009.
- Gadis Arivia, "Sukarno dan Gerakan Perempuan, Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan", *Kompas*, 1 Juni 2001.
- Lucas, Anton E., "Wanita dalam Revolusi: Pengalaman Selama Pendudukan dan Revolusi 1942-

- 1950”, *Prisma* 5, Mei 1996, hlm. 17-27.
- Julia Suryakusuma, *Agama, Seks, dan Kekuasaan*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.
- _____, *Ibuisme Negara*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2013.
- Muniarti, A P., “Perempuan Indonesia dan Pola Ketergantungan”, *Citra Wanita dan Kekuasaan Jawa*, Yogyakarta: Isis, 1992.
- Nina Andriana, “Sejarah Gerakan Politik Perempuan di Indonesia”, *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen*, Jakarta: LIPI, 2012.
- Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Terj., Yogyakarta: UGM Press, 1986.
- Sukarno, *Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perdjoeangan Repoeblik Indonesia*, Yogyakarta: Oesaha Penerbitan Guntur, 1947.
- _____, *Wanita Indonesia Selalu Ikut Bergerak Dalam Barisan Revolusioner*, Pidato, Jakarta: (tp.), 24 Juli 1964.
- Wieringa, Saskia Eleonora., *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, Jakarta: Gerba Budaya, 1999.
- _____, “The Birth of The New Order State in Indonesia: Sexual Politic and Na-tionalism”, *Stri: Jurnal Studi Wanita*, Vol. 1 No. 1 Januari 2002, hlm. 53-79.